



# **LAPORAN** **KINERJA INSTANSI PEMERINTAH** **(LKIP)**

**BAPPEDA BIAK NUMFOR TAHUN 2022**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**2023**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP BAPPEDA merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor atas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023, Rencana Kerja (RENJA) 2022 yang telah disusun. LKIP Tahun 2022 juga merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan RENSTRA, RENJA 2022, dan juga dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Penyusunan LKIP BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKIP BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor tidak terlepas dari kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKIP BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022.

Biak, 17 Januari 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Biak Numfor



Michael Ronald Isir, S.T  
Pembina  
NIP. 19820304 200909 1 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Kinerja Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dari Program/Kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 dengan jumlah keseluruhan indikator sasaran sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan demikian perlu komitmen yang kuat agar di tahun mendatang lebih ditingkatkan lagi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berkesinambungan.

---

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
1.3. Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Unsur Organisasi .....	2
1.4. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh .....	8
1.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Biak Numfor .....	9
1.6. Sistematika Penyajian .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	12
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	15
2.3 Rencana Kinerja Program .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>23</b>
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	23
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	32
B. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah .....	39
C. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah .....	41
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	46
3.3 Akuntabilitas Kepegawaian dan Umum .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b> SK Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022.....	53

# *Visi Kabupaten Biak Numfor*

**Biak Numfor yang Religius,**

**Berkarakter dan Berbudaya**

**Sebagai Sumbu Pertumbuhan yang berdaya Saing,**

**Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian**





# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi-misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan dan *update* terhadap perkembangan dunia saat ini.

Sejalan dengan hal tersebut maka setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, setiap perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya, yang merujuk pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Pemerintah melalui kementerian yang berwenang.

## 1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda yang dituangkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022, sebagai berikut :

### a. Kedudukan

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala

Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Bappeda

Bappeda Kabupaten Biak Numfor mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; penyelenggaraan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
6. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

### 1.3. Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Unsur Organisasi

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

a. Susunan Organisasi

Kepala Badan

Sekretariat;

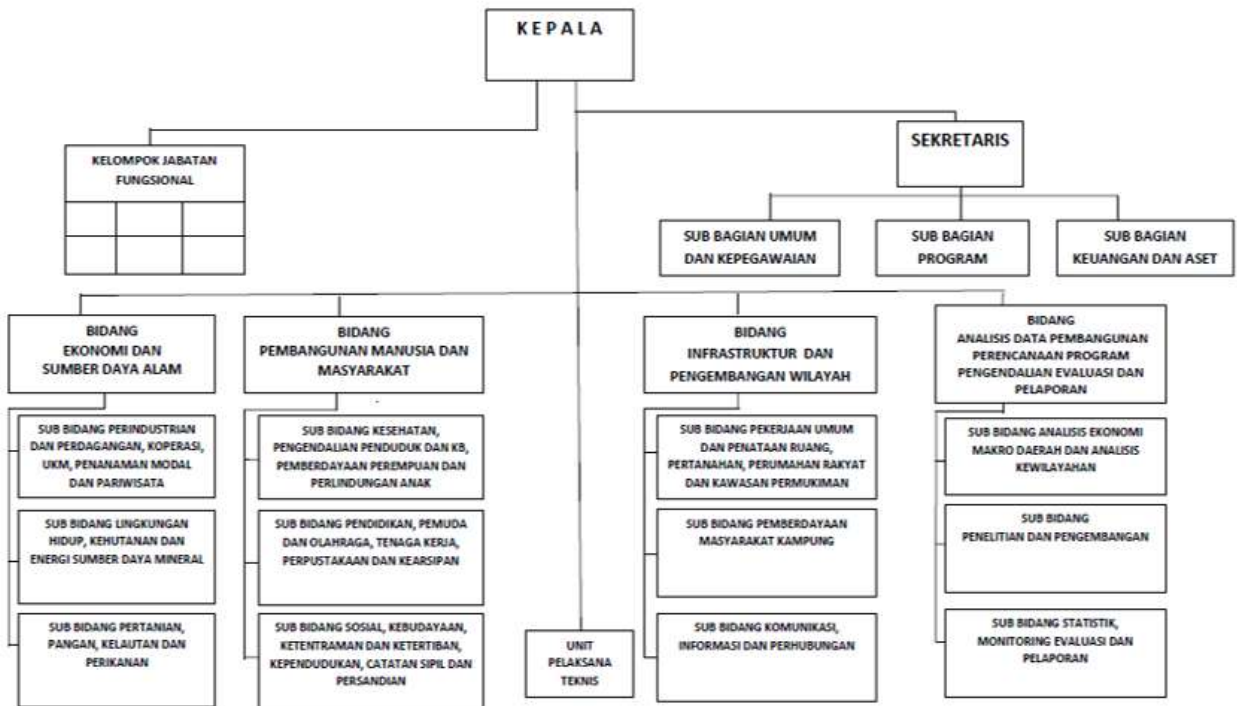
Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan, Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah;

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

Gambar 1 Struktur Organisasi Bappeda Biak Numfor



b. Tata Kerja

1. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
2. Kepala Badan bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Kepala Badan mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.
4. Setiap pegawai di lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
5. Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

Fungsi dan tugas dari Kepala, Sekretaris dan masing-masing Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor dirinci sebagai berikut :

1). Kepala

Kepala Bappeda mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan.

Kepala Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah;



- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- d. Pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
- f. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

## 2). Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a). Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b). Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c). Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d). Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- e). Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program Badan;
- f). Penyusunan Program Badan;
- g). Penatausahaan urusan umum ;
- h). Penatausahaan kepegawaian;
- i). Penatausahaan Keuangan; dan
- j). Pengelolaan inventaris Badan

## 3). Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan, Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan, Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu tugas-tugas kepala badan dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Analisis Ekonomi Makro Daerah dan Analisis Kewilayahan, Penelitian dan Pengembangan serta Data Statistik Monev dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan Program kerja perencanaan pembangunan daerah di bidang Data Pembangunan, Evaluasi, Pelaporan dan Penelitian Pembangunan;
- b) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan dibidang Analisis Data Pembangunan, Evaluasi, Pelaporan dan Penelitian Pengembangan;
- c) Pnganalisis dan pengolah data dalam rangka penyusunan perencanaan dibidang Analisis Data Pembangunan, Evaluasi, Pelaporan dan Penelitian Pengembangan;

- d) Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbanan sebagai kebijakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan dibidang pemerintahan;
  - e) Penyusunan perencanaan program pembangunan dan pengembangan pemeritahan Daerah;
  - f) Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dibidang penelitian dan pengembangan;
  - g) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang penelitian dan pembangunan menyusun lapporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang penelitian dan pengembangan;
  - h) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dibidang penelitian dan pengembangan;
  - i) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang Sosial Budaya, dan Pemerintahan;
  - j) Pengkoordinasian pembangunan dibidang Pendidikan, Inovasi dan Teknologi;
  - k) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah dibidang Ekonomi Makro Daerah dan Analisis Kewilayahan;
  - l) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Penelitian pembangunan daerah dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - m) Penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang Sosial Budaya;
  - n) Pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam ranngka mengetahui hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi untuk mencari penyelesaian masalah;
  - o) Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - p) Menyajikan dan mengamankan data imformasi pembangunan daerah; dan
  - q) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.
- 4). Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas membantu tugas-tugas Badan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan, Pemuda Olahraga, tenaga kerja, Perpustakaan, Kebersihan serta urusan Sosial, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Kependudukan dan Catatan Sipil dan Persandian sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dalam melaksanakan tugasnya bidang pembangunan manusia mempunyai fungsi :

- a) Mengkordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b) Penyusunan Program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- c) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- d) Penganalisis dan pengolah data dalam rangka penyusunan perencanaan dibidang pembangunan manusia dan masyarakat;

- e) Pengoptimalan peran dan fungsi pembangunan manusia dan masyarakat sebagai kebijakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia;
  - f) Penyusunan perencanaan program pembangunan manusia dan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat;
  - g) Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  - h) Pemantauan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat serta menyusun laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  - i) Pengkoordinasian perencanaan dibidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
  - j) Pengkoordinasian pembangunan dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Kearsipan;
  - k) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - l) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah dibidang Sosial, Kebudayaan, Trantib BUN Linmas, Adminduk;
  - m) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Manusia dan Masyarakat, unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - n) Penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan Pembangunan di Bidang Sosial Budaya;
  - o) Pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam rangka mengetahui hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi untuk mencari penyelesaian masalah; dan
  - p) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.
- 5). Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu tugas-tugas Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan, sumber daya manusia, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas bidang ekonomi dan sumber daya alam mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b) Penganalisis dan Pengolah Data dalam rangka penyusunan perencanaan di bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- c) Pengoptimalan peran dan fungsi Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai kebijakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- d) Penyusunan perencanaan Program pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pengembangan Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

- e) Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - f) Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata serta menyusun laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - g) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber Daya Alam;
  - h) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dibidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan;
  - i) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - j) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pemabngunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam ke unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - k) Penyusun laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
  - l) Pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam rangka mengetahui hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi untuk mencari penyelesaian masalah; dan
  - m) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya
- 6). Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu tugas-tugas Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan Bidang Peerjaan Umum dan Penata Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Komunikasi, Informasi dan Perhubungan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja perencanaan pembangunan daerah dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b) Penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c) Penganalisis dan Pengolah Data dalam rangka penyusunan perencanaan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d) Pengoptimalan peran dan fungsi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai kebijakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e) Penyusunan perencanaan Program Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f) Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- g) Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah serta menyusun laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah;
- h) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan Pembangunan dibidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman;
- i) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Tranmigrasi;
- j) Pengkoordinasian pembangunan dibidang Komunikasi, Informasi dan Perhubungan;
- k) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ke unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l) Penyusunan laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m) Pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam rangka mengetahui hasil yang dicapai serta masalah yang dihadapi untuk mencari penyelesaian masalah; dan
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya

#### 1.4. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

##### a. Kepegawaian

Bappeda didukung oleh 35 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang Kepala Badan. Mayoritas berpendidikan S1 serta memiliki ketrampilan memadai yang merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Bappeda dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun komposisi pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Berdasarkan jenis kelamin : 8 orang perempuan dan 29 orang laki-laki.
- b. Berdasarkan pendidikan :

Tingkat Pendidikan	Jumlah
- Tamat S2	5 orang
- Tamat S1	23 orang
- Tamat D3	1 orang
- Tamat SLTA	6 orang
- Tamat SLTP	1 orang

- c. Berdasarkan Golongan :

Golongan	Jumlah
- Golongan IV a	1 orang
- Golongan III d	9 orang
- Golongan III c	10 orang
- Golongan III b	6 orang
- Golongan III a	3 orang
- Golongan II d	1 orang
- Golongan II c	-
- Golongan II b	5 orang
- Golongan II d	1 orang

## b. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik sarana dan prasarana yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk mendukung mobilitas kinerja, Beberapa kendaraan yang dikuasai oleh Bappeda kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 20 unit dan kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 3 unit dalam kondisi baik. Bappeda Biak Numfor menempati gedung utama berlantai 2 (dua) dengan luas bangunan 600m<sup>2</sup> yang representative untuk dapat menampung 44 orang pegawai dan memiliki 2 (dua) lahan parkir. Bangunan kedua yaitu ruang pertemuan Bappeda (Gallery Bappeda) memiliki luas 120 m<sup>2</sup>, namun jumlah dan kapasitas ruang rapat dirasa belum cukup memadai mengingat frekuensi koordinasi yang cukup tinggi dari setiap bidang.

## c. Anggaran

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2022 Bappeda Kabupaten Biak Numfor dialokasikan anggaran APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 sebesar **Rp.20.249.150.195** (*Dua Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) kemudian pada APBD-P Tahun 2022 mengalami penurunan pagu indikatif menjadi sebesar **Rp. 20.102.633.375** (*Dua Puluh Miliar Seratus Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri dari 3 Program, 13 Kegiatan dan 32 Sub kegiatan.

## 1.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Biak Numfor

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi terkait dengan penelitian dan pengembangan;
- f. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Biak Numfor menghadapi permasalahan, yaitu :

1. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan belum memadainya kompetensi perencanaan.

2. Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang;
3. Terbatasnya informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan;
4. Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai feedback dalam proses pembangunan daerah;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi serta pengendalian;
6. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah.
7. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Biak Numfor.

Permasalahan yang dihadapi tersebut berdampak terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Biak Numfor maupun Renstra Bappeda Kabupaten Biak Numfor, capaian Standar Pelayanan Minimal. Untuk tantangan Bappeda ke depan adalah meningkatkan fungsi koordinasi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan, perubahan paradigma adanya perencanaan pembangunan yang partisipatif, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, memanfaatkan terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak lain, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, mengoptimalkan SDM yang tersedia, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah yang terbatas, dan meningkatkan kemampuan SDM.

## **1.6. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

### **Bab I – Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta struktur organisasi;

### **Bab II – Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022.

### **Bab IV – Penutup**

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Renstra telah melalui beberapa tahapan koordinasi baik di tingkat internal Bappeda maupun koordinasi bersama Tim di Lingkup Kabupaten Biak Numfor.

Dokumen tersebut merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023, sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Bappeda Kabupaten Biak Numfor di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan dan Sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Biak Numfor untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

#### 1. Visi

*“Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya sebagai Sumbu Pertumbuhan Yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan kemandirian “*

#### 2. Misi

*Dalam* rangka pencapaian visi, maka disusun misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dan pemanfaatan potensi unggulan daerah
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan profesional, berorientasi kepada pelayanan publik yang prima
4. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang berwawasan lingkungan dan tata ruang.

#### 3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi, Misi Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut: Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah.

#### 4. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran, Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan

## 5. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi dan sumber alam
- b. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
- c. Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang masyarakat dan manusia
- d. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
- e. Peningkatan penelitian dan pengembangan

## 6. Kebijakan, Program dan Kegiatan

### a. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi sumberdaya manusia, sarana prasarana, dana dan metode kinerja.
- 2) Meningkatkan koordinasi, transparansi, dan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam proses bottom up dan top down Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 3) Meningkatkan eksistensi Pengendalian Program Pembangunan Daerah.

### b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Mebel
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- h) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
  - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- i) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor
- j) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMN dan RKPD)
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMN dan RKPD)- RIPDA.
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

## **2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

Dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan arah kebijakan kabupaten Biak Numfor dalam rangka mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), program/kegiatan serta anggaran dan sumber pendanaan.

Bappeda Biak Numfor telah melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang dibuat antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Bupati Biak Numfor, sebagaimana berikut :

## Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WILSON J. TITAHENA, S.Pi., MM

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERRY A. NAAP, S.Si., M.Pd

Jabatan : BUPATI BIAK NUMFOR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Biak, Februari 2022

PIHAK KEDUA  
  
HERRY A. NAAP, S.Si., M.Pd

PIHAK PERTAMA  
  
WILSON J. TITAHENA, S.Pi., MM

## PERJANJIAN KINERJA

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak  
 Numfor  
 Tahun : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian prgram serta kegiatan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi RKPd terhadap RPJMD	92 %
		Persentase OPD dengan kualitas perencanaan Baik	84 %
		Persentase OPD dengan hasil evaluasi telah menerapkan ABK	80%
		Persentase hasil program prioritas daerah	93 %
		Persentase OPD dengan capaian hasil program $\geq$ 80%	88%
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang di tindak lanjuti	100%

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.896.753.795	DAU / OTSUS
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran	Keterangan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
5.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 6.203.709.900	DAU / OTSUS
6	Program Pengembangan Data/Informasi			
7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.148.767.000	DAU
8	Program Perencanaan Sosial Budaya			
9	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			
10	Program Perencanaan Tata Ruang			
11.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			

Biak, Februari 2022

Bupati Biak Numfor



HERRY A. NAAF, S.Si., M.Pd

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor



WILSON J. TITAHENA S.Pi., MM

## 2.3 Rencana Kinerja Program

Rencana Kinerja Program Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Rencana Kinerja Bappeda merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 dengan memperhatikan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Adapun Rencana Kinerja Program/Kegiatan Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022, disajikan pada Tabel 1

Tabel 1 Program/ Kegiatan Bappeda Biak Numfor Tahun 2022

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Total Pagu</b>	<b>20.249.150.195</b>	<b>20.102.633.375</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.690.000</b>	<b>14.690.000</b>
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.690.000	14.690.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.302.441.290</b>	<b>5.722.239.120</b>
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.270.641.290	5.675.659.120
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.800.000	46.580.000
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.386.865.000</b>	<b>244.365.000</b>
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	149.933.000	149.933.000
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.236.932.000	94.432.000
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.825.440.125</b>	<b>2.654.404.725</b>
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.077.500	39.000.500
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	648.558.625	1.024.900.225
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102.000.000	150.000.000
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.700.000	-



No	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.041.104.000	1.440.504.000
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>320.178.650</b>	<b>405.850.620</b>
-	Pengadaan Mebel	110.078.650	110.078.650
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.100.000	295.771.970
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>535.365.980</b>	<b>617.024.260</b>
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.997.000	12.298.000
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.978.580	240.966.260
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.630.400	22.000.000
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.760.000	341.760.000
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>511.692.250</b>	<b>710.667.250</b>
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.712.500	211.660.000
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.980.000	199.980.000
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.999.750	299.027.250
<b>B</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>6.203.709.900</b>	<b>9.733.392.400</b>
<b>1</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>949.998.500</b>	<b>949.998.500</b>
-	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	749.998.500	749.998.500
-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000
<b>2</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>949.954.000</b>	<b>1.323.954.000</b>

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	549.954.000	623.954.000
-	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	700.000.000
<b>3</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>4.303.757.400</b>	<b>7.459.439.900</b>
-	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	3.427.332.400	3.236.332.400
-	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	876.425.000	4.223.107.500
<b>C</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>3.148.767.000</b>	<b>3.173.932.500</b>
<b>1</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>975.000.000</b>	<b>639.310.000</b>
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	400.000.000	-
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	575.000.000	639.310.000
<b>2</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>898.767.000</b>	<b>1.054.622.500</b>
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200.000.000	200.000.000
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	400.000.000	400.000.000
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	298.767.000	454.622.500

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>1.275.000.000</b>	<b>1.480.000.000</b>
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	175.000.000	330.000.000
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.100.000.000	1.150.000.000



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini akan memberikan gambaran mengenai tingkat capaian Sasaran dan tolok ukur kinerja Program/kegiatan selama tahun 2022.

### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Guna mengetahui gambaran tentang Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan perbandingan antara Rencana Kinerja Bappeda Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 dengan realisasi program dan kegiatan.

Pengukuran tingkat Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, sedangkan hasil Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input*, *Output*, *Outcome*, *Benefit*, dan *Impact*.

Kemudian hasil Pencapaian Sasaran dan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan tersebut dievaluasi agar mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 80 % – 100 % = Baik
- 50% – 79% = Cukup
- < 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

#### 3.1.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator Kinerja Kegiatan dikelompokkan menjadi:

- a) Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.

- b) Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- c) Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d) Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e) Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

### 3.1.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Indikator capaian kinerja yang akan dievaluasi dalam laporan ini adalah indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2

**Tabel 2 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja**

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.690.000	Jumlah Dokumen yang tersedia	Pelaporan Kinerja Pembangunan	100%	100%	100%
2	<b>Administrasi Keuangan</b>						

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Perangkat Daerah</b>						
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.675.659.120	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kualitas pelayanan publik terpenuhi	95%	100%	100%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	46.580.000	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD	Kualitas Pelayanan Publik terpenuhi	84%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	149.933.000	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang terlaksana	Kualitas SDM aparatur memadai	57%	100%	100%
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.432.000	Jumlah ASN yang terlatih dalam pengelolaan Keuangan	Kualitas SDM aparatur memadai	0%	0%	0%
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.000.000	Jumlah komponen listrik tersedia	Kualitas Pelayanan Publik terpenuhi	100%	100%	100%
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.024.900.225	- Tersedianya jumlah alat tulis kantor - Tersedianya jumlah bahan bakar minyak Kualitas Pelayanan Publik terpenuhi - Tersedianya jumlah bahan Pembersih - Tersedianya jumlah makanan dan minuman	Kualitas Pelayanan Publik terpenuhi	84%	100%	100%

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	Tersedia jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kualitas Pelayanan Publik terpenuhi	100%	100%	100%
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	0	Tersedianya Jumlah bahan bacaan dan Perundang-undangan	Kualitas Pelayanan Publik terpenuhi	0	0	0
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.440.504.000	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	Kualitas Pelayanan Publik terpenuhi	93%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						
-	Pengadaan Mebel	110.078.650	Jumlah mebel tersedia	Operasional pelayanan publik terukur	100%	100%	100%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	295.771.970	Jumlah Peralatan yang tersedia	Operasional pelayanan publik terukur	100%	100%	100%
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.298.000	Jumlah Surat menyurat yang terlaksana	Operasional Pelayanan publik terukur	100%	100%	100%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.966.260	Tersedianya jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terlaksana	Operasional Pelayanan publik terukur	70%	100%	100%
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000	Jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Operasional Pelayanan publik terukur	10%	100%	100%

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.690.000	Jumlah jasa Administrasi yang tersedia Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	Operasional Pelayanan publik terukur	92%	100%	100%
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.660.000	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	Kualitas barang milik daerah memadai	47%	50%	50%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.980.000	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	Kualitas barang milik daerah memadai	100%	100%	100%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.027.250	Jumlah Luas Gedung Kantor yang tersedia Jumlah Space Iklan yang terpelihara	Kualitas barang milik daerah memadai	63%	100%	100%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>						
<b>1</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>						
-	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	749.998.500	Jumlah data arah pembangunan tahunan yang tersusun dalam musrenbang RKPD	Draf Dokumen rencana Pembangunan Daerah	94%	100%	100%



No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	Jumlah verifikasi usulan program/kegiatan pembangunan daerah	Draf Dokumen rencana Pembangunan Daerah	63%	100%	100%
2	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
-	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	623.954.000	Jumlah aplikasi terbangun sebagai bank data perencanaan	Perencanaan pembangunan terarah dan berkualitas	90%	100%	100%
-	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	- Jumlah Buku IPM dan PDRB yang tersusun - Jumlah Dokumen Profil Daerah yang Tersusun	Perencanaan pembangunan terarah dan berkualitas	99%	100%	100%
3	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
-	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	3.236.332.400	- Jumlah evaluasi tahunan pelaksanaan RKPD yang terlaksana - Jumlah informasi pembangunan tersedia - Jumlah koordinasi Pemantapan Perencanaan Bidang Statistik Pengendalian dan Evaluasi yang terlaksana - Jumlah Penyusunan RKPD	Dokumen Perencanaan Data pembangunan daerah	84%	100%	100%

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Induk dan Perubahan				
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.049.175.000	- Jumlah Monev Otsus terlaksana - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terlaksana	Dokumen Perencanaan data Pembangunan daerah	98%	100%	100%
<b>C</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>						
1	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>						
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	- Jumlah dokumen masterplan Kesehatan yang tersusun - Jumlah dokumen masterplan Pendidikan yang tersedia	Dokumen perencanaan	0%	0%	0%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	639.310.000	-Jumlah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang social budaya -Jumlah pendampingan Stunting	Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>						
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)-RIPDA	200.000.000	Terlaksananya jumlah koordinasi	Dokumen perencanaan	100%	100%	100%
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	400.000.000	- Jumlah Dokumen Inventarisasi dan Analisis Objek pajak dan Retribusi daerah yang tersusun - Jumlah Dokumen master plan air limbah yang tersedia - Jumlah dokumen PDRB menurut Wilayah yang tersusun	Dokumen Perencanaan	0%	0%	0%
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	454.622.500	Jumlah koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam yang terlaksana	Dokumen Perencanaan	99%	100%	100%
3	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>						

No	Kegiatan	Target Capaian Indikator Kinerja			Realisasi Capaian Indikator Kinerja (%)		
		Input (Rp)	Output	Outcomes	Input	Output	Outcomes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	330.000.000	-Jumlah ketersediaan infrastruktur di masing-masing pusat kegiatan di Kabupaten Biak Numfor -Jumlah Koordinasi bidang Prasarana Wilayah	Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.150.000.000	- Jumlah Dokumen Master Plan Kawasan perbatasan distrik Swandiwe dan Bondifuar yang tersusun -Jumlah Mekanisme pemberian insentif dan disentif dalam pemanfaatan ruang di Kab. Biak Numfor -Jumlah pemanfaatan neraca penatagunaan tanah perkotaan biak - Jumlah penunjang peningkatan perencanaan Bidang Penataan Ruang yang tersedia - Jumlah potensi dan permasalahan pengembangan wilayah pulau Numfor - Jumlah sosialisasi penyusunan capaian indicator dalam pembangunan kampung dalam tataran perencanaan daerah	Dokumen Perencanaan	84%	90%	100%

Dari uraian pada tabel 3.1 menggambarkan bahwa *Evaluasi Capaian Indikator Kinerja* dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**

Pada tahun anggaran 2022 dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, 12 (dua belas) diantaranya tidak mencapai target realisasi keuangan, namun target fisik telah maksimal dilaksanakan sehingga berdampak pada peningkatan capaian realisasi atas indikator keluaran (outcome) yang dihasilkan.

12 (dua belas) sub kegiatan yang dimaksud, sbb ;

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi keuangannya mencapai 95%
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, realisasi keuangannya mencapai 84%
- c. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, realisasi keuangannya mencapai 57%
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, tidak terealisasi keuangannya atau 0%
- e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi keuangan 84%
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, realisasi keuangan 0%
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi keuangan 93%
- h. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi keuangan 70%
- i. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi keuangan 10%
- j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi keuangan 92%.
- k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi keuangan 47%.
- l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny 63%.

Berdasarkan kondisi dari 12 (dua belas) kegiatan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa adanya perlambatan dalam proses realisasi anggaran, dengan capaian fisik yang tidak mencapai 100%. Sedangkan realisasi keuangan hanya mencapai 89,65%. Hal ini menggambarkan perlu adanya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan tahun 2023 guna menunjang pelayanan Kinerja administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya aktifitas kesekretariatan Bappeda Kab.Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 14.690.000	Rp. 14.690.000	100%
Keluaran: Jumlah Dokumen tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Hasil yang dicapai: Pelaporan kinerja Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

## Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Operasional Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp 5.675.659.120	Rp.5.379.410.090	94,8%
Keluaran: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Kualitas pelayanan publik terpenuhi	100%	100%	100%

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Operasional Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.46.580.000,-	Rp. 39.325.000,-	84%
Keluaran: Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	8 kali	8 kali	100%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang baik.	100 %	100%	100%

## Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

### a). Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 149.933.000,-	Rp. 84.912.300,-	57%
Keluaran: Jumlah layanan admisnistrasi kepegawaian yang terlaksana	39 kali	39 kali	100%
Hasil yang dicapai: Kualitas SDM aparatur memadai	100%	100%	100%

### b). Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 94.432.000	Rp. 0	0%
Keluaran: Jumlah ASN yang terlatih dalam pengelolaan keuangan	16 Orang	-	0%
Hasil yang dicapai: Terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.	100%	-	0%

## Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

### a). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.39.000.000,-	Rp.39.000.000	100%
Keluaran: Jumlah Komponen Listrik tersedia	12 Jenis	12 Jenis	100%
Hasil yang dicapai: Kualitas Pelayanan Publik Terpenuhi	100%	100%	100%

b). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pelayanan aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 1.024.900.225,-	Rp. 864.599.500	84%
Keluaran:			
Tersedianya jumlah alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100%
Tersedianya Bahan Bakar Minyak	8000 liter	8000 liter	
Tersedianya Perlengkapan dan Bahan Pembersih	22 jenis	22 jenis	
Tersedianya Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	
Hasil yang dicapai: Kualitas pelayanan Publik terpenuhi	100%	100%	100%

c). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan administrasi perkantoran			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 150.000.000,-	Rp.150.000.000	100%
Keluaran:			
Tersedianya Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	21000 lembar	21000 lembar	100%
Hasil yang dicapai: Kualitas pelayanan publik terpenuhi	100 %	100%	100%

d). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengetahuan Aparat Perencanaan			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 0,-	Rp.0,-	0%
Keluaran:			
Tersedianya jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	16 Eksemplar	0	0%
Hasil yang dicapai: Kualitas Pelayanan publik terpenuhi	100 %	0	0%



e). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya koordinasi dan konsultasi SKPD			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 1.440.504.000	Rp. 1.333.701.460	93%
Keluaran: Tersedianya Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	12 bulan	100%
Tersedianya Sewa Mobilitas Darat Penunjang Operasional Dinas/Kantor	12 bulan	12 bulan	
Hasil yang dicapai: Meningkatnya koordinasi antara bappeda dengan lembaga lain	12 bulan	12 bulan	100%

**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dalam kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah terdapat 2 (dua) sub kegiatan dan telah dilaksanakan secara optimal, sehingga capaian realisasi fisik dan keuangan memenuhi target 100%

a). Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.110.078.650	Rp.110.078.650	100%
Keluaran: Jumlah Meubel tersedia	5 unit	5 unit	100%
Hasil yang dicapai: Operasional pelayanan publik terukur	100 %	100 %	100%

b). Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.295.771.970	Rp.295.700.000	100%
Keluaran: Jumlah peralatan yang tersedia	7 unit	7 unit	100%
Hasil yang dicapai: Operasional pelayanan publik terukur	100 %	100%	100%

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat 4 (empat) sub kegiatan dan telah dilaksanakan secara optimal, sehingga capaian realisasi fisik dan keuangan memenuhi target 100%

a). Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.12.298.000	Rp.12.298.000	100%
Keluaran: Jumlah surat menyurat yang terlaksana	540 Surat	540 Surat	100%
Hasil yang dicapai: Operasional pelayanan public terukur	100%	100%	100%

b). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya Dana	Rp.240.966.260	Rp. 167.528.000	70%
Keluaran: Tersedianya Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Operasional pelayanan publik terukur	100%	100%	100%

c). Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya Dana	Rp.22.000.000	Rp. 2.300.000	10%
Keluaran: Tersedianya Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	100%
Hasil yang dicapai: Operasional pelayanan publik terukur	100%	100%	100%

d). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya Dana	Rp.341.760.000,-	Rp. 314.760.000,-	92%
Keluaran: Jumlah Jasa Administrasi yang tersedia Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	14 Orang 34 Kali	14 Orang 34 Kali	100%
Hasil yang dicapai: Operasional pelayanan publik terukur	100 %	100%	100%

**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 2 (dua) sub kegiatan dan tidak terlaksana secara optimal, sehingga capaian realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai target 100%.

a). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.211.660.000	Rp.99.580.000	47%
Keluaran: Jumlah Kendaraan yang terpelihara	10 Unit	5 Unit	50%
Hasil yang dicapai: Kualitas barang milik daerah memadai	100%	50%	50%

b). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.199.980.000,-	Rp.199.870.000,-	100%
Keluaran: Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	52 unit	52 unit	100%
Hasil yang dicapai: Kualitas barang milik daerah memadai	100%	100%	100%

c). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pelayanan Adminisrasi Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp.299.027.250,-	Rp.188.928.000	63%
Keluaran:			
Jumlah luas Gedung kantor yang terpelihara	8.598 m <sup>2</sup>	8.598 m <sup>2</sup>	100%
Hasil yang dicapai: Kualitas barang milik daerah memadai	100%	100%	100%

**B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada tahun anggaran 2022 dalam Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdapat 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan besaran total anggaran Rp. 6.559.459.500,- (*Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*) dan realisasi keuangan Rp.5.839.197.900 (*Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) atau penyerapan anggaran sebesar 89%.

1. **Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

a). Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 749.998.500	Rp. 706.184.500	94%
Keluaran: Jumlah data arah pembangunan tahunan yang tersusun dalam musrenbang RKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Hasil yang dicapai: Draf Dokumen Rencana Daerah	100%	100%	100%

b). Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%

Masukan: Tersedianya dana	Rp 200.000.000	Rp126.000.000	63%
Keluaran: Jumlah verifikasi usulan program/kegiatan pembangunan daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
Hasil yang dicapai: Draf Dokumen rencana Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%

## 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

### a). Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 623.954.000	Rp. 561.554.000	90%
Keluaran: Jumlah aplikasi terbangun sebagai bank data perencanaan	1 paket	1 paket	100%
Hasil yang dicapai: Perencanaan pembangunan terarah dan berkualitas	100 %	100%	100%

### b). Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 700.000.000	Rp. 694.426.000	99%
Keluaran: - Jumlah Buku IPM dan PDRB yang tersusun - Jumlah Dokumen Profil Daerah yang Tersusun	2 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	100%
Hasil yang dicapai: Perencanaan pembangunan terarah dan berkualitas	100 %	100%	100%

## 3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

### a). Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
--	--	--	--

INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Jumlah Dana	Rp. 3.236.332.400	Rp. 2.723.761.900	84%
Masukan : - Jumlah evaluasi tahunan pelaksanaan RKPD yang terlaksana - Jumlah informasi pembangunan tersedia - Jumlah koordinasi Pemantapan Perencanaan Bidang Statistik Pengendalian dan Evaluasi yang terlaksana - Jumlah Penyusunan RKPD Induk dan Perubahan	1 kali 970 buah 2 kali 27 kali 2 kali	1 kali 970 buah 2 kali 27 kali 2 kali	100%
Hasil yang dicapai: Dokumen Perencanaan data Pembangunan daerah	100%	100%	100%

b). Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 1.049.175.000	Rp. 1.027.271.500	98%
Keluaran: - Jumlah Monev Otsus terlaksana - Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terlaksana	2 kali 19 Distrik	2 kali 19 Distrik	100%
Hasil yang dicapai: Dokumen Perencanaan data Pembangunan daerah	100 %	100%	100%

### C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Guna mendukung program perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia telah dialokasikan dana sebesar Rp. 395.232.000,- untuk membiayai sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dengan realisasi anggaran sebesar 99% dan realisasi fisik 100%

a). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0
Keluaran: - Jumlah dokumen masterplan Kesehatan yang tersusun - Jumlah dokumen masterplan Pendidikan yang tersedia	0	0	0
Hasil yang dicapai: Dokumen perencanaan	0	0	0

- b). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda Kab. Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 639.310.000	Rp. 639.070.000	100%
Keluaran: -Jumlah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang social budaya -Jumlah pendampingan Stunting	19 Distrik 1 Kegiatan	19 Distrik 1 Kegiatan	100%
Hasil yang dicapai: Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

## 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Guna melaksanakan program perencanaan pembangunan ekonomi telah dialokasikan dana sebesar Rp. 1.054.622.500,- untuk sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, sampai dengan akhir tahun 2022 realisasi keuangan sebesar Rp. 448.448.000 atau 43% dengan realisasi fisik 100%.

- b) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)-RIPDA

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 200.000.000	Rp. 0	0
Keluaran: Terlaksananya jumlah koordinasi	16 kali	0	0
Hasil yang dicapai: Dokumen perencanaan	1 Dokumen	0	0

c) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 400.000.000	Rp. 0	0
<b>Keluaran :</b> - Jumlah Dokumen Inventarisasi dan Analisis Objek pajak dan Retribusi daerah yang tersusun - Jumlah Dokumen master plan air limbah yang tersedia - Jumlah dokumen PDRB menurut Wilayah yang tersusun	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	0
Hasil yang dicapai:  Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	0	0

d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda Kabupaten Biak Numfor			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 454.622.500	Rp. 448.448.000	99%
<b>Keluaran:</b>  Jumlah koordinasi perencanaan bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam yang terlaksana	30 kali	30 kali	100%
Hasil yang dicapai:  Sinkronisasi perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	100%	100%	100%

3. **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Guna mendukung program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah telah dialokasikan dana sebesar Rp. 1.480.000.000,- untuk membiayai 3 (tiga) Sub kegiatan yakni kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dengan realisasi anggaran sampai tahun anggaran 2022 berakhir sebesar Rp.1.298.555.000 atau realisasi keuangan sebesar 88%.

a). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)



Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 330.000.000	Rp. 329.779.000	100%
Keluaran: -Jumlah ketersediaan infrastruktur di masing-masing pusat kegiatan di Kabupaten Biak Numfor -Jumlah Koordinasi bidang Prasarana Wilayah	1 Dokumen 5 Kali	1 Dokumen 5 Kali	100 % 100 %
Hasil yang dicapai: Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

b). Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur			
INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
Masukan: Tersedianya dana	Rp. 1.150.000.000	Rp. 968.776.000	84%
<b>Keluaran:</b> - Jumlah Dokumen Master Plan Kawasan perbatasan distrik Swandiwe dan Bondifuar yang tersusun -Jumlah Mekanisme pemberian insentif dan disentif dalam pemanfaatan ruang di Kab. Biak Numfor -Jumlah pemanfaatan neraca penatagunaan tanah perkotaan biak - Jumlah penunjang peningkatan perencanaan Bidang Penataan Ruang yang tersedia - Jumlah potensi dan permasalahan pengembangan wilayah pulau Numfor - Jumlah sosialisasi penyusunan capaian indicator dalam pembangunan kampung dalam tataran perencanaan daerah	1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen  2 Kali	1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen  2 Kali	100 %  100 %  100 %  100 %  0
<b>Hasil yang dicapai:</b>  Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

### 3.2 Akuntabilitas Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2022, jumlah Dana yang dikelola oleh Bappeda Kabupaten Biak Numfor melalui Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 **Rp. 20.249.150.195** (*Dua Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Berdasarkan DPPA Tahun 2022 Pagu Anggaran Bappeda menjadi sebesar **Rp. 20.102.633.375** (*Dua Puluh Miliar Seratus Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri dari 3 Program, 13 Kegiatan dan 32 Sub kegiatan. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, jumlah dana yang telah direalisasikan sebesar **Rp. 17.521.813.250** (*Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau mencapai **87%**.

Namun demikian, capaian realisasi keuangan bukanlah tolok ukur pencapaian realisasi kinerja . hal tersebut ditunjukkan oleh pencapaian hasil kegiatan (*outcome*) Bappeda Tahun Anggaran 2022 sebesar **87%**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas keuangan Bappeda Biak Numfor tahun 2022 berada pada skala **Baik**.

Berdasarkan hasil realisasi keuangan diatas, maka dapat dievaluasi ketercapaian indikator kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2021 kemudian dibandingkan dengan hasil kinerja pada tahun 2022, seperti terlihat pada tabel berikut :

No	Uraian Program	Tahun 2021		Persen (%)	Tahun 2022		Persen (%)
		Pagu	Realisasi		Pagu	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Total Pagu Anggaran</b>	<b>14.673.586.144</b>	<b>12.502.174.338</b>	<b>85,20</b>	<b>20.102.633.375</b>	<b>17.521.813.250</b>	<b>87,16</b>

Berdasarkan hasil perbandingan evaluasi realisasi keuangan diatas, maka dapat dievaluasi ketercapaian indikator kinerja Bappeda Biak Numfor. Terlihat pada tahun 2021 dengan pagu sebesar **Rp. 14.673.586.144** (*Empat Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) dengan Realisasi keuangan sebesar **85%** lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dengan pagu anggaran **Rp.20.102.633.375** (*Dua Puluh Miliar Seratus Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dengan capaian keberhasilan penyerapan anggaran **87,16**. Sehingga pencapaian realisasi anggaran Bappeda tahun 2022 dapat disimpulkan penyerapan anggaran terlaksana efektif dan efisien.

## Hasil Capaian Kinerja Organisasi

Perbandingan Target Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Tahun 2022, Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	92%	68%	74%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	REALISASI 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	62%	68%

Dari tabel di atas, diketahui pada Tahun 2022 tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD meningkat 62% menjadi 68% dari target 92% yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun. Nilai ini belum mencapai target dikarenakan penyesuaian regulasi, kebijakan yang menyebabkan pelaksanaan program/kegiatan kurang maksimal.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 terhadap target jangka menengah dalam dokumen strategis organisasi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	68%	64%	76%	60%	84%	62%	92%	68%	100%	

Capaian kinerja pada tahun 2022 yang merupakan tahun keempat Renstra 2019–2023 ditargetkan sebesar 92%. Target kinerja tersebut tercapai 68% sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 74%.

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis dipengaruhi oleh SDM yang berkompeten, memiliki antusias dalam kerja, memiliki dedikasi dan komitmen, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel, di bawah ini.

**Tabel Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PRORAM/KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Faktor pendukung lainnya, yaitu: (1) Terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian; dan (2) Perjanjian Kinerja yang berakibat pada perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang memiliki integritas, produktivitas, tanggungjawab, dan kesanggupan memberikan pelayanan prima. Sedangkan faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja, yaitu:

1. Data dan informasi yang terbatas yang mempengaruhi evaluasi;
2. Hasil evaluasi yang belum dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan;
3. Berbagai regulasi dan kebijakan yang selalu baru di tingkat pusat hingga ke daerah, yang menghabiskan waktu dan energi untuk melakukan penyesuaian;
4. Terbatasnya kapasitas aparatur perencana dalam melakukan perkiraan, penetapan tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang terukur.

#### **Kebijakan Strategis yang Ditetapkan**

Pada tahun anggaran 2022, kebijakan yang diambil oleh kepala daerah untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis, sebagai berikut:

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Perubahan RKPD Tahun 2022, merupakan tindaklanjut dari berubahnya perencanaan dan penganggaran untuk perubahan target kegiatan dan sub kegiatan sesuai kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya; penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.	Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022.	Memberikan acuan kepada Perangkat daerah dalam melaksanakan target kegiatan, program dan sasaran daerah.

#### **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya**

Pada tahun anggaran 2022, kebijakan yang diambil oleh kepala daerah untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis, sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Perlu ada penugasan khusus tenaga pendamping ketika	• Sebelum pelaksanaan Musrenbang di tingkat kampung dan tingkat distrik, BAPPEDA	Diharapkan dengan pemberitahuan ini, setiap kampung dan distrik dapat

	pelaksanaan Musrenbang Kampung-Distrik	<p>mengirimkan pemberitahuan tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan Musrenbang kepada Kepala Distrik melalui Surat pemberitahuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distrik menindaklanjuti dengan menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada setiap kampung di wilayahnya.</li> <li>• Selanjutnya Kampung dan Distrik terkait dapat mengundang tenaga pendamping untuk menghadiri pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat kampung maupun tingkat distrik.</li> </ul>	<p>mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas perencanaan mulai dari tingkat kampung hingga distrik, sehingga hasil mampu merumuskan program kegiatan yang tepat sasaran bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.</p>
	Penambahan pegawai Sub Bidang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permintaan penambahan pegawai sub bidang pernah dilakukan pada tahun 2021 dan baru terealisasi pada bulan November tahun 2022, namun hanya 1 orang pegawai.</li> <li>▪ Permintaan penambahan pegawai sub bidang akan dilakukan untuk memaksimalkan capaian kinerja BAPPEDA</li> <li>▪ Kekurangan pegawai untuk saat ini diisi oleh tenaga honorer administrasi dan operator komputer, yang keduanya harus mampu mengoperasikan microsoft office terutama excel, bertanggung-jawab dan loyal.</li> </ul>	<p>Salah satu sub bidang yaitu Sub bidang yang sebelumnya tidak memiliki staf, kini memiliki staf.</p>
	Pelatihan SIPD	<p>Pelatihan SIPD telah dimuat dalam dokumen DPA BAPPEDA T.A 2022, namun tidak terealisasi baik anggaran maupun kegiatannya.</p>	-

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian target dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda tahun 2019-2023, sebagai berikut:

- a. Penggunaan aplikasi perencanaan yang terintegrasi seperti SIPD yang berdampak pada tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencana.

- c. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor.
- d. Peningkatan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan

### 3.3 Akuntabilitas Kepegawaian dan Umum

Faktor-faktor yang akan dinilai untuk mengukur Akuntabilitas Kepegawaian dan Umum adalah:

#### a) **Tingkat kehadiran pegawai**

Jumlah hari kerja Staf Bappeda Kabupaten Biak Numfor dalam tahun anggaran 2022 sebanyak 246 hari kerja atau rata-rata 19,66 hari kerja per bulan dengan rata-rata tingkat kehadiran 34 pegawai Bappeda Kabupaten Biak Numfor. Jika dibandingkan antara jumlah hari kerja per tahun dengan tingkat kehadiran pegawai Bappeda dalam tahun anggaran 2022, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kehadiran pegawai mencapai 85,63% atau berada pada skala *BAIK*.

#### b) **Surat menyurat**

Dalam tahun anggaran 2022, jumlah surat yang diterima oleh sekretariat Bappeda sebanyak 559 surat, sedangkan jumlah surat keluar sebanyak 573 lembar surat. Surat masuk dari Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor sebanyak 59 surat, Sekretariat Daerah Provinsi Papua 3 Surat dan 29 surat dari Bupati Biak Numfor.

#### c) **Analisa tingkat kebutuhan pegawai**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor memiliki pegawai yang berkompeten namun dari sisi jumlah, jumlah tersebut masih kurang dimana masih ada sub bidang yang memiliki hanya 1 (satu) orang staf, bahkan ada sub bidang yang tidak memiliki staf ASN sehingga harus dibantu oleh tenaga honorer. Namun demikian, seluruh program dan kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik, meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa pekerjaan.

Dalam rangka menopang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Biak Numfor di masa yang akan datang, perlu untuk diperhatikan tingkat kebutuhan pegawai, yaitu:

- 1) Pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan sesuai bidang tugas;
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III dan Tingkat II bagi pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
- 3) Sosialisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dalam Daerah dan Luar Daerah.





## BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor disusun dan selanjutnya diajukan kepada Bupati Biak Numfor dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Dari hasil analisa terhadap capaian kinerja, capaian sasaran, kinerja keuangan dan kinerja kepegawaian dan umum dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor berada pada skala **Baik**.

Beberapa hal yang dapat diusulkan melalui laporan ini adalah hal-hal yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kinerja aparat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah :

- 1). Penguatan kapasitas aparat perencana melalui program pendidikan dan latihan teknis perencanaan.
- 2). Penguatan kapasitas lembaga melalui program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan IV bagi aparat perencana.
- 3). Penguatan kapasitas aparat perencana melalui program sosialisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dalam daerah dan luar daerah.

Terkait usulan di atas dipandang sangat penting mengingat beban kerja dan tanggung jawab dalam upaya menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas. Disadari pula bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna karena adanya berbagai kendala yang dijumpai selama penyusunan LKIP Bappeda Tahun Anggaran 2022, namun kiranya kendala tersebut menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kinerja aparat Bappeda Kabupaten Biak Numfor. Sumbang saran demi perbaikan dan penyempurnaan LKIP Bappeda Tahun Anggaran 2023 sangat kami harapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Biak Numfor dan Wakil Bupati Biak Numfor, Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, para Staf Ahli Bupati Biak Numfor, Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang telah membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Biak Numfor selama Tahun Anggaran 2022, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membalas budi baik bapak/ibu/saudara sekalian.

Kepada seluruh aparat perencana yang telah mendedikasikan potensi diri, membangun sinergitas dan loyalitas, serta tetap mempertahankan semangat "Satu Tim" disampaikan rasa bangga dan terima kasih.

Biak, 17 Januari 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Biak Numfor





**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Majapahit No 1 Biak Telp. (0981) 21980. Fax : (0981) 21688

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA**  
**KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**NOMOR : 050/005/1/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022**

**KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk optimalisasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Biak Numfor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022
- Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Uraian tugas Tim Penyusun dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Ketua
    1. membimbing Tim Penyusun Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
    2. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja Tim Penyusun Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022; dan
    3. melaporkan hasil kerja tim baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati Biak Numfor.
  - b. Sekretaris
    1. menghimpun dan menginventaris penyelenggaraan administrasi penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022;
    2. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022; dan
    3. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022.
  - c. Anggota
    1. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang berhubungan Laporan Kinerja

Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022;

2. membantu pelaksanaan tugas ketua dan sekretaris dalam rangka pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022; dan
3. melaksanakan tugas administrasi lainnya.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPPEDA Tahun Anggaran 2023.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak

Pada tanggal : 13 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BIAK NUMFOR



**MICHAEL RONALD ISIR, ST**

Pembina

NIP. 19820304 200909 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Biak Numfor di Biak (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor di Biak;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor di Biak;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
5. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Biak Numfor di Biak;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR : 050/005/II/2023  
TANGGAL : 13 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BAPPEDA KABUPATEN BIAK NUMFOR  
TAHUN 2022**

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	MICHAEL R. ISIR, ST Nip.19820304 200909 1 002	Ketua	
2.	ARNOLD R. K. KBAREK, S.IP Nip.19870828 200701 1 002	Sekretaris	
3.	SRAM P. MARYEN, SE Nip. 19820404 201104 1 003	Anggota	
4.	MULYADI HAMZAH Nip. 19800115 201004 1 001	Anggota	

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BIAK NUMFOR



**MICHAEL RONALD ISIR, ST**

Pembina

NIP. 19820304 200909 1 002